

## PENGARUH ALOKASI BELANJA MURNI DAN ALOKASI BELANJA PERUBAHAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN KABUPATEN / KOTA DI ACEH

<sup>1)</sup>Soraya Lestari, <sup>2)</sup>Dr. Syukry Abdullah, SE., M.Si, Ak, <sup>3)</sup>Dr. Hasan Basri, M. Com, Ak

<sup>1)</sup>Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3)</sup>Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

***Abstract:** This study aimed to examine the effect on the Regional Government Budget (ABPD) and Regional Government Revised Budget (APBD-P) to the budget absorption in district/cities in Aceh. This is motivated by the high value of the budget changes that exceed the reasonableness and low realization of absorption. In this study, researchers are also looking to do with the agency theory. Estimates of expenditure and revenue for the year is to permit local governments to spend the money allocated (Bagdigen, 2004). However, not all regions are able to realize their budgets optimally. The low absorptions of the budget is an important issue. This is because the low budget absorption impact on the bad public services and non-fulfillment of economic growth assumptions. The object of this research is budget absorption of the financial statements at district/cities in Aceh. While the subjects in this study is that the budget absorption where is value of financial performance measures. This study uses a quantitative approach in which data collection is done by APBD and budget realization of financial statements. The method used is a panel data regression. The results showed that there is a negative effect of the APBD to the budget absorption, while APBD-P positive effect on absorption. Where the poor budgeting will have an impact on financial performance does not gain the target as the low absorption. Increase or shifting budget is also intended to help the realization of the budget/reduce the budget variance, so that APBD-P will be closer to the realization budget.*

***Keywords:** Regional Government Budget (APBD), Regional Government Revised Budget (APBD-P), Agency Theory, Budget Absorption*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni terhadap serapan anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) terhadap serapan anggaran pada Kabupaten/Kota di Aceh. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya nilai anggaran perubahan yang melebihi kewajaran dan rendahnya realisasi anggaran. Pada penelitian ini peneliti juga melihat kaitannya dengan *agency* teori. Estimasi anggaran belanja dan pendapatan selama satu tahun merupakan ijin untuk pemerintah daerah dalam menghabiskan uang yang dialokasikan (Bagdigen, 2004). Namun, tidak semua daerah mampu merealisasikan anggarannya dengan optimal. Bagaimanapun juga rendahnya serapan anggaran merupakan masalah yang penting. Hal ini dikarenakan serapan anggaran yang rendah berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal dan tidak terpenuhinya asumsi pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah serapan anggaran yang merupakan nilai ukur kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pengumpulan data dilakukan berdasarkan data APBD dan laporan keuangan realisasi anggaran. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif anggaran awal terhadap serapan anggaran sedangkan anggaran perubahan berpengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ini dikarenakan penganggaran yang buruk akan berdampak pada kinerja keuangan yang tidak mencapai target seperti rendahnya serapan anggaran. Penambahan atau pengeseran anggaran juga dimaksudkan untuk membantu realisasi anggaran/memperkecil varian anggaran, sehingga perubahan anggaran akan semakin mendekati anggaran dengan realisasinya.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Perubahan, *Agency* Teori, Serapan Anggaran.

## PENDAHULUAN

Penganggaran merupakan isu penting di setiap negara. Hal ini dikarenakan anggaran mencerminkan seluruh pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Penganggaran pula merupakan penciptaan suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan dan dinyatakan dalam ukuran keuangan. Menurut Mayer, et al. (1991) anggaran yang disetujui adalah rencana fiskal awal pemerintah daerah.

Pencapaian target kinerja terutama anggaran merupakan tugas penting dalam sistem pemerintahan. Sadar akan hal itu, setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlomba-lomba untuk mencapai target anggaran dengan memaksimalkan pelayanan publik. Namun demikian masih banyak SKPD yang belum bisa mencapai targetnya sehingga anggaran pemerintah masih banyak tidak terealisasi sampai akhir tahun. Di sisi lain surplus/defisit anggaran tidak selalu mencerminkan baik buruknya kinerja keuangan. Beberapa Kabupaten/Kota memerlukan APBD perubahan sehingga dapat membantu mempercepat serapan anggaran.

Dari data realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Aceh APBD murni Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2011 sebesar Rp430.128.422.989,- dengan anggaran perubahan sebesar Rp464.993.480.412,- namun hanya mampu serapan sebesar 93% atau Rp432.940.294.034,-. Pada Kabupaten Aceh

Selatan APBD murni tahun 2011 sebesar Rp544.500.441.156,- dengan APBD perubahan Rp578.346.378.064,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp545.931.366.475,-. Sama halnya dengan Kota Sabang, APBD murni tahun 2011 sebesar Rp429.488.014.333,- dengan APBD perubahan mencapai Rp447.985.155.408,- namun hanya mampu terealisasi sebesar Rp387.370.869.777,- atau 86% dari anggaran perubahan (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014, Juli). Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran dan tingginya nilai anggaran perubahan.

APBD perubahan yang bertempo singkat pun sering dikaitkan dengan *agency theory*. Hal ini dapat dilihat dari tingginya anggaran perubahan yang menunjukkan adanya kepentingan dari pihak terkait dalam penganggaran. Blais & Dion (1990) menyatakan bahwa dalam penganggaran, *agency* cenderung menaikkan alokasi anggarannya. Kenaikan anggaran dapat disebabkan oleh berbagai kepentingan seperti pemilihan umum (pemilu). Maksimalisasi anggaran oleh SKPD berimplikasi pada berkurangnya alokasi anggaran untuk SKPD lain yang lebih membutuhkan alokasi tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dalam sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Abdullah & Nazry, 2014)

Anggaran perubahan sering dikaitkan dengan *agency theory* sehingga tidak mudah

untuk menentukan anggaran perubahan, sebagaimana Forrester (1991) menyatakan bahwa *“budgetary decisions are often influenced by many factors, including politics, the economy and technology, but the impact of each influence is often unknown until after the fact.”*

Dalam pelaksanaannya sering terjadi perubahan atas rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lee & Plummer (2007) menyatakan bahwa administrator menyesuaikan anggarannya sebagai cara untuk memprediksi kenaikan beban. Penyesuaian anggaran dapat menjadi alat untuk alokasi biaya dan memaksimalkan pendapatan.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Anggaran Daerah**

Menurut UU (Undang-Undang) No.17 Tahun 2003 anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam Halim (2008:84) anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Namun tidak sembarang orang dapat menggunakan anggaran ini. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Untuk membantu merumuskan

anggaran SKPD harus mengetahui fungsi anggaran itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2004:122) ada beberapa fungsi utama dari anggaran yang antara lain sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi serta alat penciptaan ruang publik.

Anggaran juga dapat menjadi alat politik dan strategi untuk melindungi kepentingan pengguna anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran dapat digunakan untuk memperoleh dana baru. Sebagaimana Wildavsky (1979) dalam Cornia & Usher (1981:73) menyatakan bahwa *“novice administrator is socialized to accept budgeting as a game of strategy in which the goal of the line manager is to protect, maintain, and if possible, expand the agency ‘base’ by getting his or her ‘fair share’ of new funds.”* Hal ini menunjukkan adanya perilaku moral hazard dalam penganggaran dan penggunaan anggaran, dimana anggaran bisa saja digunakan untuk mendanai kegiatan dengan cara bagi hasil keuntungan untuk memperoleh dana baru. Dalam penganggaran *agency* (manajer) seharusnya berpedoman pada penganggaran terpadu. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada

prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana sehingga mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 16), disebutkan bahwa lingkup pelayanan publik antara lain adalah pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pelayanan publik tersebut dibiayai dengan anggaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah, sehingga anggaran sangat penting dalam membantu mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun periode anggaran selama 1 (satu) tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Bagdigen (2004) bahwa *“The cycle of municipality’s budget runs between the 1st January and 31st December. The process constitutes annually estimated spending and*

*revenues and gives permission to local units to spend the allocated money.”*

Menurut Afiah (2009:15) jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Transaksi ini menggunakan belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah meliputi: Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja tidak langsung menurut pasal 37 meliputi:

- a. Belanja pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;
- e. Bantuan sosial;
- f. Belanja bagi hasil;
- g. Bantuan keuangan; dan
- h. Belanja tidak terduga.

### **Serapan Anggaran**

Serapan anggaran menjadi isu yang sering dibicarakan setiap mendekati akhir tahun anggaran. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berlomba untuk bisa melaporkan penyerapan anggaran yang paling besar. Hal ini dikarenakan persentase serapan

anggaran yang besar dipandang sebagai bentuk kinerja yang baik, walaupun hal itu perlu diuji apakah penyerapan anggaran yang tinggi juga sejalan dengan kinerja pelayanan yang memuaskan. Namun di sisi lain penyerapan anggaran yang rendah juga mengakibatkan ketidakefisienan dalam penganggaran.

Menurut Abdullah dan Nazry (2014) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Serapan Anggaran (LRA). Namun sayangnya, peningkatan serapan anggaran juga tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan. Sebagaimana Lee & Plummer (2007) menyebutkan bahwa *“budget ratcheting in a government environment involve ratcheting of expenditures rather than earning and is consistent with inefficiencies.”*

Menurut Asmara (2010) meskipun perubahan anggaran dapat terjadi karena alasan ekonomi, politik dan sosial, namun pada umumnya disebabkan faktor finansial dan kebutuhan fiskal. Perubahan anggaran juga menentukan surplus/defisit anggaran, sebagaimana Abdullah & Nazry (2014) menyimpulkan bahwa penganggaran di Pemerintah daerah menganut konsep surplus dan defisit, dimana jumlah pendapatan tidak selalu sama dengan jumlah belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja disebut surplus jika pendapatan lebih besar dari pada belanja dan disebut defisit, dan sebaliknya. Jika terjadi

surplus maka akan dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban atau diskresi dalam pengeluaran pembiayaan, seperti pembayaran pokok pinjaman dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Sebaliknya jika terjadi defisit, maka harus dicari sumber pendanaan tambahan dari penerimaan pembiayaan, seperti dengan memanfaatkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), melakukan pinjaman, atau dengan pelepasan investasi (penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan).

### **Alokasi Anggaran Perubahan**

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 155 disebutkan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang mana dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Menurut Wildavsky (1988) dalam Forrester & Mullins (1992) *“Rebudgeting is what government do to revise and update the adopted budget during the course of the fiscal years.”* Di sisi lain Asmara (2010) menyatakan bahwa *rebudgeting* merupakan kelanjutan dari proses penganggaran tahunan yang mana sisa uang di kas daerah bisa dialokasikan kembali ke dalam tahun anggaran berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cornia,

et al. (2004) menyatakan bahwa dalam proses perencanaan, estimasi pendapatan pada masa yang akan datang sangat penting untuk dilakukan, meskipun perubahan estimasi tetap bisa dilakukan. Anessi-Pessina & Sicilia (2012) dalam hipotesisnya terhadap pengaruh *rebudgeting* pada variabel polotik menyatakan bahwa diantara variabel politik yang lebih berpengaruh adalah lingkungan administrasi politik. Pada perubahan anggaran tidak ada Musrenbag/RKPD sehingga anggaran perubahan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan SKPD sampai tutup akhir tahun anggaran.

### **Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik**

Teori keagenan telah banyak diteliti dan dikembangkan sebagai variabel dalam penelitian. Teori keagenan ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh perilaku *principal-agent*, sebagaimana Luby (2010) menyatakan bahwa teori *principal-agent* banyak dikembangkan dalam penelitian sosial dan bisnis termasuk ekonomi, ilmu politik, akuntansi, keuangan, hokum bisnis, dan administrasi publik. Sedangkan Lupia & McCubbins (2000) juga menyatakan bahwa “*delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal’s behalf.*” Sama halnya dengan Lee & Plummer (2007) yang menyatakan bahwa pejabat terpilih diasumsikan menjadi agen rasional dan mementingkan diri

sendiri, mereka akan terlibat dalam perilaku memaksimalkan anggaran.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder yang diperoleh dari data laporan keuangan dan dokumen laporan pertanggungjawaban APBD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi laporan pertanggungjawaban oleh Dinas Keuangan Aceh periode tahun 2011-2013. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini dikarenakan data yang dibutuhkan untuk penelitian telah mencukupi dan memenuhi kriteria.

### **Operasionalisasi Variabel**

#### **Serapan Anggaran**

Serapan anggaran merupakan Kemampuan Pemda dalam menyerap anggaran belanja. Pada penelitian ini Variabel Terikat (*dependent variable*), yakni serapan anggaran periode tahun 2011-2013 Variabel Terikat (*dependent variable*). Halim & Abdullah (2006) menyatakan bahwa “untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika serapan dilaksanakan target tersebut mudah dicapai.”

#### **Alokasi belanja murni**

Alokasi belanja murni merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PP nomor 58 Tahun 2005). Alokasi belanja murni merupakan Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan estimasi alokasi belanja murni mempengaruhi alokasi besaran anggaran perubahan itu yang akan dibuat/tidak dilakukan. Menurut Bland & Nunn (1992) ada dua proses penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain: siklus anggaran operasional, yang menghasilkan rencana keuangan bagi aktivitas pemerintahan dan siklus anggaran belanja modal, yang merupakan perencanaan untuk mendapatkan peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Kedua komponen tersebut terangkum, baik dalam anggaran awal (APBD) murni maupun dalam anggaran perubahan dalam satu tahun anggaran.

### **Alokasi belanja perubahan**

*Rebudgeting*/alokasi belanja perubahan adalah revisi pemerintah dan *update* terhadap anggaran selama satu tahun anggaran (Forrester & Mullins, 1992). Pada penelitian ini Variabel Terikat (*dependent variable*), yakni serapan anggaran periode tahun 2011-2013 Variabel Terikat (*dependent variable*).

### **Metode Analisis**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah uji regresi data panel, yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* selama periode 2011-2013 pada Kabupaten/Kota di Aceh. Menurut Kuncoro (2009:231) tujuan dari analisis adalah untuk menjelaskan atau memprediksi variabel terkait berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan berganda (*multiple regression*).

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Pengujian Koefisien Regresi Alokasi Belanja Murni**

Berdasarkan uji regresi yang dilakukan antara variabel bebas alokasi belanja murni terhadap variabel terikat serapan anggaran maka diperoleh hasil koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar -0,005. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja murni terhadap serapan anggaran berpengaruh negatif. Hasil penelitian Rahayu, et al. (2007) menyatakan bahwa penerapan *performance budgeting* dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran lebih banyak dinikmati oleh kalangan birokrasi. Alokasi anggaran sangat penting dalam suatu birokrasi karena, semakin besar alokasi anggaran belanja atau beban APBD maka beban Pemda (pemerintah daerah) akan semakin berat.

Forrester (1991) menyatakan bahwa "*budgetary tools will be used to the degree*

*budget player perceive them as providing net budgetary benefit.*” Banyaknya pihak yang mengambil keuntungan dalam penganggaran menyebabkan sulit untuk mengukur besarnya serapan anggaran walaupun diketahui semakin besar APBD semakin kecil serapan anggaran.

### **Pengujian Koefisien Regresi Alokasi Belanja Perubahan**

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang dilakukan antara variabel alokasi belanja perubahan terhadap serapan anggaran, maka diperoleh hasil positif sebesar 0,010 atau 1%. Artinya, setiap kenaikan 1 rupiah terhadap perubahan anggaran maka akan meningkatkan serapan anggaran sebesar 1%.

Anessi-Pessina (2011) menyatakan bahwa “*Bigger organizations tend to be more complex and difficult to manage ... larger and more complex governments are more likely to need mid-year adjustments.*” Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya alokasi anggaran perubahan perlu untuk dilakukan. Penambahan atau pergeseran anggaran dimaksudkan untuk membantu realisasi anggaran/memperkecil varian anggaran, sehingga perubahan anggaran akan semakin mendekati antara anggaran dengan realisasinya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data SPSS dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hubungan antar variabel alokasi belanja murni dan alokasi belanja perubahan berpengaruh terhadap serapan anggaran karena salah satu atau kedua koefisien  $\beta \neq 0$ . Alokasi belanja murni berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran dan alokasi belanja perubahan berpengaruh positif terhadap serapan anggaran. Pengaruh alokasi belanja perubahan terhadap serapan anggaran sebesar 0,010 atau 1% dengan arah hubungan yang positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 rupiah alokasi belanja perubahan maka akan terjadi serapan anggaran sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Alokasi APBD murni memiliki pengaruh terhadap serapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi untuk alokasi belanja murni sebesar -0,005 yang bermakna bahwa jika terjadi perubahan angka dalam APBD murni sebesar 1% maka akan menyebabkan perubahan dalam serapan anggaran sebesar -0,5%.

### **Saran**

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di berbagai propinsi lain sehingga peneliti dapat melihat perbedaan dari setiap daerah baik yang memiliki otonomi khusus dan non otonomi khusus.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang belum pernah diteliti, hal ini untuk melihat

kemungkinan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap realisasi. Salah satunya dapat berupa ukuran anggaran (*budget size*) sebagai variabel independen tambahan.

3. Menggunakan alat ukur rasio anggaran lain yang lebih akurat sesuai dengan variabel yang diteliti. Misalnya dengan memasukkan variabel-variabel yang digunakan oleh Abdullah, dkk., (2015).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Rahmadhaniatun Nazry. 2014. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah (Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan). *Makalah dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA), IAI-KAPD Wilayah DKI Jakarta di Universitas Mercu Buana*. Jakarta. 27 Februari.
- \_\_\_\_\_, Romaidon Darma & Hasan Basri. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah. *Makalah akan Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) ke-2 IAI KAPD Jakarta-Banten*. 26 Februari.
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Anessi-Pessina, Eugenio, Maria Francesca Sicilia, & Ileana Steccolini. 2011. *Rebudgeting in Italian Municipalities: Magnitude and Drivers*. Universita Cattolica, Rome: *Working Paper*.
- \_\_\_\_\_, & Maria Francesca Sicilia. 2012. Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese Twins? *Public Administration Review* 72(6): 875-884.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 3(2): 142-157.
- Bagdigen, Muhlis. 2004. Local Budgeting in Turkey. *Papers Departement of Public Finance*. Web: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1403869](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1403869).
- Bland, Robert L. & Samuel Numm. 1992. The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets. *Publik Budgeting & Finance* 12(2):32-47.
- Blais, Andre & Stephane Dion. 1990. Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics. *Polity* 22(4):655-674.
- \_\_\_\_\_, Ray D. Nelson & Andrea Wilko. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review* 64(2): 164-179.
- Cornia, Gary C. & Charles L. User. 1981. The Institutionalization of Incrementalism in Municipal Budgeting. *Southern Review of Public Administration* 5(1): 73-91.
- \_\_\_\_\_. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review* 64(2): 164-179.
- Forrester, John P. 1991. Budgetary Constrains and Municipal Revenue Forecasting. *Policy Sciences* 24(4): 333-356.
- \_\_\_\_\_, & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review* 52(5): 467-473
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1): 53-64.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Haryo. 2008. Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja: Studi Kasus

- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 1(2): 126-143.
- Lee, Tanya M. & Elizabeth Plummer. 2007. Budget Adjustment in Respon to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures. *Jurnal of Management Accounting Research* 19: 137-167.
- Lim, Dongkuk. 2011. Budget Ratcheting and Agency Problem. *Dissertation*. Dallas: The University of Texas.
- Luby, Martin J., 2010. Agency Problems in Public Financial Management: Evidence from Debt Refinancing Practices. *Dissertation*. Bloomington: Indiana University.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. Representation or Abdication? How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mayper, Alan G., Michael Granof & Gary Giroux. 1991. An Analysis of Municipal Budget Variances. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 4(1): 29-50.
- Rahayu, Sri, Unti Lidigdo & Didiet Affandy. 2007. Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi. *Simposium Nasional Akuntansi X*, UNHAS Makasar 26-28 Juli.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.